

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengelola, mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan serta memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban suatu desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.²

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan menurut asas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa diwujudkan dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, dan semua uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa ialah semua hak dan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban desa.³

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kualitas laporan pemerintah menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai bentuk akuntabilitas masyarakat dalam kinerja pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan.⁵

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Rina Maulina dan Lisa Fatmi, Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Implikasinya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh), *Jurnal AKBIS* Vol.2 No. 1, 2018, hal. 49

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sebagai pengganti prinsip-prinsip akuntansi dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Standar akuntansi merupakan acuan dalam penyajian laporan keuangan yang diberikan kepada pihak di luar organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi penting karena menentukan informasi yang harus disajikan oleh pembuat laporan keuangan kepada pihak di luar organisasi. Pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan apabila disajikan dengan standar atau persepsi yang dipahami dengan cara yang sama seperti penyusun laporan keuangan.⁶

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Penggunaan (BPKB) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain: dokumen penatausahaan, surat

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

permintaan pembayaran (SPP), bukti penerimaan, surat setoran pajak (SSP), buku pajak, laporan-laporan, laporan penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber data), laporan penatausahaan buku kas umum, buku bank, buku pembantu, dan register. Sistem aplikasi SISKEUDES ini memiliki kelebihan yaitu sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Penerapan SISKEUDES berkaitan dengan *Decision Usefulness Theory*, teori ini mensyaratkan bahwa informasi akuntansi harus memberikan kualitas yang berguna untuk para penggunanya. Implementasi dari teori ini adalah bahwa pemerintah desa harus membuat dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terhadap setiap pengguna untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal. Adanya SISKEUDES ini akan membantu pengelola keuangan desa dalam menyusun laporan keuangan, sehingga semakin memahami menggunakan SISKEUDES maka semakin kecil kesalahan material yang akan terjadi dan akan membuat laporan keuangan semakin berkualitas sehingga informasi yang ada didalamnya dapat berguna bagi pengguna dan memudahkan pengguna mengambil sebuah keputusan yang baik.⁷

⁷ Sahidah, *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Siskeudes, dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur*, Surabaya: Artikel Ilmiah Tidak di Terbitkan, 2020, hal. 6-7

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Teori kompetensi diperkenalkan oleh David McClelland dalam artikelnya berjudul *“Testing for competence rather than for intelligence”*, yang dikatakan bahwa ada karakteristik dasar yang lebih penting dalam menilai keberhasilan kerja yaitu kompetensi. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Adapun tujuan dari kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, Meningkatkan komitmen karyawan dan mengurangi turn over dan absensi. Dalam hal ini adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.⁸

Kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal (SPI) paling baik diterapkan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang disengaja atau tidak

⁸ Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar*, Gianyar: Artikel Ilmiah Tidak di Terbitkan, 2020, hal. 2

disengaja seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah urus oleh pengelola pelaporan keuangan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan. Tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk memberikan jaminan yang memadai guna tercapainya efisiensi, efektivitas, dan penghindaran kerugian keuangan nasional bagi kepentingan masyarakat dan daerah.⁹

Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha suatu instansi pada saat tertentu/kurun waktu tertentu. Laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan bagi banyak pengguna. Laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan investasi, penjualan saham, dan untuk tujuan lainnya.¹⁰

Dampak pandemic covid-19 mengakibatkan rencana kerja pemerintah desa mengalami perubahan yang awalnya dalam RKP

⁹ Sagumany dan Chica Desianti, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi...*, hal. 31

¹⁰ Dhinik Resantri, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Blitar*, Tulungagung: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2022, hal. 2

dituangkan untuk infrastruktur desa dan hal ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dengan adanya bencana non alam seperti covid-19 ini RKP desa berubah sesuai dengan yang terbaru bahwa dana untuk infrastruktur dialihkan menjadi untuk kestabilan ekonomi masyarakat desa yaitu dijadikan dana bantuan langsung tunai (BLT) dan untuk anggaran desa bagi hasil pajak serta retribusi daerah ke desa sudah pasti menurun dikarenakan kebijakan atas pembayaran pajak diturunkan sehingga berakibat kepada pendapatan desa. Desa memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur di wilayah pedesaan dan membantu kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar sampai kesehatan public. Dengan itu dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk desa harus tersalurkan dengan baik ditunjang dengan kualitas laporan keuangan desa yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aplikasi siskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel moderasi. Terdapat dua variabel independen (bebas) yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aplikasi siskeudes, penerapan siskeudes, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Sampel yang dijadikan objek adalah aparatur pemerintah desa yang ada di kabupaten Kediri. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berjudul **"Pengaruh Penerapan Standar**

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk mendefinisikan masalah terkait dengan variabel penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kasus mengenai adanya perbedaan penyajian Laporan Keuangan antar Pemerintahan Desa di Indonesia sehingga perlu diteliti lebih dalam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

2. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Akuntabilitas Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Aplikasi Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
6. Apakah Akuntabilitas Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
7. Apakah Akuntabilitas Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Untuk menganalisis apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

3. Untuk menganalisis apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4. Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5. Untuk menganalisis apakah Akuntabilitas Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Aplikasi Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Keuangan
6. Untuk menganalisis apakah Akuntabilitas Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
7. Untuk menganalisis apakah Akuntabilitas Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pijakan serta referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Serta dapat menjadi referensi pustaka pada perpustakaan UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam prodi Akuntansi Syariah, yang khususnya peneliti yang mengambil topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi instansi

Bagi instansi Pemerintahan Desa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan.

b. Bagi akademisi

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam rangka perbaikan proses pembelajaran mahasiswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai pengaplikasian ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan serta menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Materi

Inti permasalahan dalam penelitian ini ialah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

b. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di Kabupaten Kediri yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas laporan keuangan desa.

2. Batasan Penelitian

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi pembahasan pada inti permasalahan penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan benar.

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

a. Penelitian ini hanya terbatas pada instansi pemerintah desa di Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab pada laporan keuangan.

b. Kemudian, bagi peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran dalam melakukan penelitian.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aplikasi Siskeudes (X1)

Standar akuntansi merupakan acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak di luar organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi membantu penyusun laporan keuangan menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak di luar organisasi. Pengguna informasi laporan keuangan di luar organisasi dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan standar atau persepsi yang dipahami dengan cara yang sama seperti penyusun laporan keuangan.¹¹

¹¹ Dhinik Resantri, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Blitar...*, hal. 10

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan dalam bentuk Accounting Questionnaire (PSAP). PSAP adalah SAP dengan nomor, judul, isi dan tanggal efektif.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan akuntansi yang harus diterapkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) maka pemerintah harus melakukan inovasi yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Bukti

Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporanlaporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register. Sistem aplikasi SISKEUDES ini memiliki kelebihan sebagai berikut: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (built-in internal control), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Jadi, Penerapan SISKEUDES yang sesuai dengan aturan akan memudahkan dalam membuat suatu laporan keuangan sehingga suatu laporan keuangan bebas dari salah saji dan laporan keuangan yang dibuat menggunakan SISKEUDES akan lebih berkualitas, dengan adanya SISKEUDES akan memudahkan dalam pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan suatu desa.¹²

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi

¹² Sahidah, Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Siskeudes, dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur..., hal. 14-15

mengacu kepada atribut/ karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi berasal dari bahasa inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang terutama pegawai untuk mencapai tingkatan pegawai profesional. Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dari pengertian para ahli di atas, dapat diuraikan bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹³

c. Sistem Pengendalian Intern (X3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

¹³ Cris Kuntadi, et. all., Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol.3 No. 5, 2022, hal. 462

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah”.¹⁴

d. Laporan Keuangan (Y)

Definisi laporan keuangan menurut Kasmir secara sederhana adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau periode yang akan datang. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan. Ini juga dapat membantu pengambilan keputusan bagi banyak pengguna. Laporan keuangan juga digunakan untuk menyajikan kinerja

¹⁴ Sagumany dan Chica Desianti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi..., hal. 33-34

perusahaan kepada pengguna laporan keuangan sehubungan dengan investasi, penjualan saham, dan tujuan lainnya.¹⁵

Kualitas laporan keuangan adalah suatu informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.¹⁶

e. Akuntabilitas (Z)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹⁷

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel secara operasional, secara praktis, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi

¹⁵ Dhinik Resantri, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan Kualitas...*, hal. 11

¹⁶ Nur Laily Zam-zam Firdaus, *Pengaruh Pengendalian Internal, Pengalaman Kerja, dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo*, Tulungagung, Skripsi: Tidak di Terbitkan, 2021, hal. 11

¹⁷ Qalbi Istiqomah, *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa*, Makassar: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2020, hal. 7-8

Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sub-sub bab disetiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka serta teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penelitian akan menyajikan hasil penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Kras.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas terkait tentang variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidaknya terhadap variable terikat.

BAB VI PENUTUP

Bagaian dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.